

# **PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DENGAN PENDEKATAN BAYANI DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BANGSRI JEPARA**

**Fathur Rohman**

Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara  
fathur\_rohman@unisnu.ac.id

## **Abstract**

*EDUCATION OF NATIONALITY INSIGHTS USING BAYANI APPROACH IN DARUL FALAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL, BANGSRI JEPARA. This study seeks to portray the nationality insight education using Bayani approach carried out by Darul Falah Islamic Boarding School, Bangsri Jepara. This research was a qualitative research with a case study approach. Data was collected by participant observation techniques, in-depth interviews, and documentation. Data analysis technique used was qualitative descriptive analysis with the stages of reduction, presentation, and ending with verification. Data analysis was carried out continuously since the beginning to the end of the study. The results of the study showed that the implementation of nationality insight education with Bayani approach was based on the emergence of propaganda that Pancasila was not in accordance with Islamic law. Furthermore, there are three important elements in nationality insight education with the Bayani approach. First, the teaching material is the text of the book Mitsaq al-Madinah or Pancasila book. Second, learning methods are bandongan, memorization, and takraran. And third, learning objectives are understanding, memorization, and attitude.*

**Keywords:** *National Insight Education, Bayani Approach, Darul Falah Islamic Boarding School.*

## Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk memotret pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bayani* yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren (PP) Darul Falah Bangsri Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik *partisipant observation*, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi, penyajian, dan diakhiri dengan verifikasi. Analisis data dilakukan secara terus-menerus semenjak awal hingga akhir penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bayani* dilatari oleh munculnya propaganda bahwa Pancasila tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, ada tiga unsur penting dalam pendidikan wawasan dengan pendekatan *bayani*. *Pertama*, bahan ajar yaitu teks kitab *Mitsaq al-Madinah* atau kitab Pancasila. *Kedua*, metode pembelajaran dengan bandongan, hafalan, dan *takraran*. Dan ketiga, tujuan pembelajaran yaitu pemahaman, hafalan, dan sikap.

**Kata Kunci:** Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pendekatan Bayani, PP. Darul Falah.

## A. Pendahuluan

Barangkali publik menganggap bahwa dialog tentang negara Indonesia dengan empat pilar penyangganya yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI telah tuntas. Seluruh elemen bangsa dianggap telah mencapai kata sepakat sehingga tidak perlu lagi membuka ruang diskusi tentang dasar dan bentuk negara. Namun faktanya tidak demikian, pasca tumbanganya Orde Baru ternyata isu tentang penggantian Pancasila dan NKRI menyeruak kembali ke permukaan bahkan cenderung menguat. Sebagian umat Islam kini secara terang-terangan berani menyampaikan keraguan mereka terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang disepakati para pendiri bangsa. Sebagian dari mereka masih bermimpi untuk mengembalikan tujuh kata pada sila pertama Pancasila sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta. Beberapa kelompok bahkan menyebut Pancasila dan tiga pilar lainnya sebagai produk kafir yang harus dimusnahkan dan menggantinya dengan syari'at Islam (Rokhmad, 2014: 4).

Dengan terbitnya Perppu No. 2 tahun 2017 yang kemudian diikuti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas terdepan pengasong khilafah, kontroversi NKRI versus syari'at Islam secara formal-politis memang bisa dikatakan telah terkubur. Tetapi dalam tataran diskursus dan pemikiran, cita-cita mendirikan negara berdasarkan syari'at Islam di Indonesia tampaknya belum ada tanda-tanda akan segera usai. Hal ini karena aktifitas dakwah dan pendidikan yang melibatkan para mantan anggota HTI tidak pernah diawasi atau dibatasi. Para tokoh penyokong atau ustadz yang pernah berafiliasi dengan HTI masih bebas berkeliaran mempromosikan pandangan mereka tanpa ada pengawasan dari pemerintah.

Fenomena pembenturan negara dengan syari'at Islam semacam ini sebenarnya bukan barang baru. Munculnya ormas-ormas dengan visi penegakan syariat Islam sudah pernah ada dalam diri Darul Islam (DI). Seperti DI, HTI dan kawan-kawannya juga berusaha mengubah Indonesia menjadi negara agama, mengganti ideologi Pancasila dengan syari'at Islam versi mereka, dan bahkan melenyapkan NKRI dan menggantinya dengan khilafah Islam. Namun di sisi lain, selalu ada mayoritas bangsa Indonesia, baik muslim atau non muslim yang setuju dengan Pancasila dan memperjuangkan gagasan para pendiri bangsa.

Nahdlatul Ulama' misalnya, jauh hari sebelum merdeka melalui Mukhtar 1935 di Banjarmasin telah memutuskan untuk tidak mendukung berdirinya negara Islam, melainkan mendorong umat Islam mengamalkan ajaran agamanya untuk membangun masyarakat yang Islami dan memperbolehkan pendirian negara bangsa. Para leluhur bangsa ini sadar bahwa Pancasila dan NKRI tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan universal semua agama atau dalam Islam disebut sebagai *maqashid al-syari'ah* (Wahid, 2009: 15).

Beberapa tokoh muslim Indonesia, seperti Amin Rais dan Hadilmulyo, juga menyatakan bahwa Pancasila sesungguhnya adalah suatu ideologi Islam atau doktrin kenegaraan Islam versi Indonesia. Sementara empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI adalah konsensus

kebangsaan yang sudah final. Dengan begitu, wacana formalisasi syari'at Islam sebagai dasar, bentuk, sekaligus sistem negara tidak lagi dibutuhkan, karena sejatinya Indonesia telah menjalankan syari'at Islam, hanya saja dalam format yang berbeda.

Keraguan sebagian umat Islam terhadap negara Indonesia, oleh Zakiyyuddin Baidhawwy disebut sebagai sebuah krisis kepercayaan dan pemaknaan atas ideologi dan dasar negara. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin keraguan ini akan berujung pada penolakan masif umat Islam terhadap dasar negara Pancasila (Baidhawwy, 2015: 42). Setidaknya ini sudah terbukti dengan beberapa kasus anti kebangsaan yang marak akhir-akhir ini. Bahkan, lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi wadah kaderisasi para pemimpin bangsa juga tercoreng dengan kasus anti kebangsaan. Baru-baru ini, beberapa lembaga pendidikan diberitakan melarang peserta didiknya melakukan penghormatan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan dengan alasan menyebabkan syirik (mediaindonesia.com, 2016). Bahkan salah satu oknum pesantren di Bogor nekat membakar umbul-umbul merah putih karena menjadi simbol negara kafir (liputan6.com, 2017).

Berangkat dari sana, masyarakat, khususnya umat Islam perlu diberikan pemahaman dan pemaknaan mengenai Pancasila beserta pilar kebangsaan lainnya, dari sudut pandang ajaran Islam dengan pendekatan nash-nash syari'at. Hal ini penting untuk membuang keraguan dan menumbuhkan keyakinan berdasarkan dalil syar'i bahwa Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pendekatan nash atau dalam epistemologi ilmu keislaman ala Abid al-Jabiri disebut dengan pendekatan *bayani* sangat penting sebagai jalan keluar bagi umat Islam dari kegamangan dan konflik batin antara agama dan negara. Sebagian umat Islam Indonesia memang masih memiliki pola pikir tekstual dan tidak mau menerima sesuatu kecuali ada bukti nash. Karenanya, umat Islam butuh penjelasan yang gamblang disertai bukti tekstual berupa dalil al-Qur'an ataupun hadits yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.

Pendekatan *bayani* bisa dimaknai sebagai pola berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini, teks sucilah yang

memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran. Sebagai sebuah pendekatan, *bayani* berarti sebuah sudut pandang atau upaya mendekati pengetahuan dengan menempatkan teks (wahyu) sebagai sebuah kebenaran mutlak. Adapun akal hanya menempati tingkat skunder dan bertugas hanya untuk menjelaskan atau mendukung teks yang ada. Menurut nalar *bayani*, nash menempati posisi sentral sehingga aktifitas intelektual tidak akan keluar dari bingkai teks (*haul al-nash*) (Naim, 2009: 78). Dengan demikian, pendidikan kebangsaan dengan pendekatan *bayani* berarti mengajarkan atau menanamkan nilai kebangsaan melalui pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan.

Sadar akan pentingnya hal ini, pondok pesantren Darul Falah Bangsri Jepara berupaya melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan dengan menggunakan pendekatan *bayani*. Dalam kerangka ini, PP. Darul falah telah menyusun kitab pegangan sendiri berisi materi-materi kebangsaan disertai argumentasi dan landasan dari teks al-Qur'an atau Hadits. Kitab ini masuk dalam struktur kurikulum pesantren dan wajib dipelajari oleh santri di madrasah diniyah pesantren. Dengan pola pembelajaran *bayani* ini, KH. Taufiqul Hakim, pengasuh PP. Darul falah ingin mengajarkan kepada masyarakat, khususnya santri bahwa wawasan kebangsaan seperti Pancasila, kebhinekaan, atau toleransi sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun Hadits.

Untuk mengungkap apa yang dilakukan PP. Darul Falah tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab: 1) Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bayani*? 2) Bagaimana pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bayani*? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif metodologi dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan di lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yakni dengan melakukan analisis terus-menerus terhadap sebuah kasus agar dapat mengambil makna dan memperoleh pemahaman. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci dalam kegiatan pengumpulan data

yang dilakukan dengan teknik *partisipant observation* wawancara mendalam, dan dokumentasi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Nalar *Bayani* dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam**

Kajian tentang sumber pengetahuan dan kebenaran dalam Islam secara garis besar mengerucut pada tiga tipe epistemologi, yaitu *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Dalam *bayani*, posisi nash sedemikian sentral sehingga segala aktivitas intelektual tidak akan pernah keluar dari lingkaran teks (*haul al-nash*). Sedangkan *burhani*, bertumpu pada seperangkat kemampuan intelektual manusia baik rasio maupun indera untuk memperoleh pengetahuan dengan cara konklusi. Sementara *Irfani*, bertumpu pada hati (intuisi) yang telah terbuka (*kasyf*) untuk menerima kebenaran (al-Jabiri, 2000: xiv). Dari ketiga epistemologi itulah kemudian lahir berbagai disiplin ilmu keislaman yang dalam terminologi Hassan Hanafi disebut dengan ilmu *naqli* murni, ilmu 'aqli murni, dan ilmu *naqli-'aqli* (M. Arif, 2008: 123).

Idealnya ketiga *epistemologi* tersebut seharusnya bisa saling menyapa, berdialog, dan saling melengkapi. Namun dalam sejarahnya, tiga tipe *epistemologi* tersebut, masing-masing berdiri sendiri diatas pondasi keilmuan masing-masing. Amin Abdullah mengatakan sebenarnya ketiga tipe sistem epistimologi ilmu-ilmu agama tersebut masih berada dalam satu rumpun, tetapi lintasan sejarah Islam mengatakan bahwa pola pikir tekstual *bayani* lebih dominan dalam membentuk mainstream pemikiran Islam. Otoritas nash dan teks-teks salaf lebih diunggulkan daripada otoritas keilmuan lain yang bersumber dari akal maupun intuisi (Abdullah, 2012: 202). Hassan hanafi juga mengatakan demikian, bahwa warisan khazanah intelektual Islam memang terlalu tunduk pada supremasi pengetahuan "tekstual" sehingga muncul adagium keunggulan *naql* atas 'aql (M. Arif, 2008: 124).

Epistimologi *bayani* memang memiliki akar historis yang sangat kuat dalam sejarah budaya dan tradisi pemikiran Arab. Sebagaimana diketahui, bangsa Arab sangat mengagungkan bahasanya, apalagi setelah bahasa Arab menjadi bahasa wahyu. Karenanya, cukup berdasar bila dikatakan bahwa peradaban

Islam dimulai dari sinergi bahasa dan agama. Awal mula aktifitas keilmuan Islam adalah penghimpunan bahasa Arab dan peletakan dasar kebahasaan seiring dengan upaya memahami ajaran agama sehingga produk intelektualnya adalah ilmu kebahasaan dan agama. Aktifitas intelektual semacam ini kemudian melahirkan pola pikir yang berorientasi pada reproduksi teks, dengan al-Qur'an sebagai intinya, dan akal sebagai penentu hukum yang dependen. Maka, sangat bisa dimaklumi sekiranya peradaban Islam disebut-sebut sebagai peradaban teks, karena begitu besar pengaruh teks dalam menciptakan produk kultural-intelektual. Bahkan lebih jauh, asumsi dasar yang melandasi segenap aktifitas kultural-intelektual adalah prinsip *al-ashl fi al-nash la fi al-waqi'* (acuan pokok ada pada teks, bukan pada kenyataan) (M. Arif, 2001: 22).

Kenyataan semacam ini pada akhirnya membentuk nalar yang bertumpu pada pemeliharaan teks dan refleksi dalam dan tentang teks. Implikasi lainnya, teks kemudian diposisikan sebagai *al-ashl* atau acuan pokok bagi aktifitas intelektual dalam nalar *bayani*. Karenanya, aktifitas intelektual nalar *bayani* tidak akan bisa melepaskan diri dari kungkungan teks. Kecenderungan ini disebut oleh Hassan Hanafi sebagai pola pikir literal-tektualis (harfiah) (M. Arif, 2008: 124). Pola pikir inilah yang selama ini mendominasi hampir semua khazanah intelektual Islam, tak terkecuali dalam ranah pendidikan Islam.

Pada era keemasan, pendidikan Islam secara umum berkembang dalam dua aliran, yaitu konservatif dan rasional. Aliran konservatif memiliki kecenderungan keagamaan yang sangat kuat. Tokoh-tokohnya antara lain Ibnu Sahnun, al-Ghazali, atau Nashiruddin al-Thusi. Implikasi dari sistem pendidikan konservatif ini adalah timbulnya pembatasan ilmu hanya pada pengetahuan kepada tuhan dan sifat-sifatnya (*ilmu al-dzat wa al-shifat*) serta pemahaman tentang perintah dan larangan-Nya. Sedangkan aliran pendidikan rasional lebih cenderung menggunakan nalar rasional dalam segala aktifitas pendidikan. Aliran ini memaknai pendidikan sebagai usaha untuk mengaktualisasikan potensi individu menjadi kemampuan. Para filosof macam al-Kindi, Ibnu Sina, atau Ibn Rusyd adalah pelopor aliran ini (M. Arif, 2008:109-110).

Pertautan epistemologi *bayani* dan pendidikan Islam di masa keemasan tersebut telah memberi pengaruh signifikan terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam hingga saat ini. Kuatnya pengaruh nalar *bayani* bisa dirasakan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya di pesantren yang memang memiliki hubungan geneologis dengan tradisi pemikiran *bayani* pada abad pertengahan. George Makdisi sebagaimana dikutip Mahmud Arif menyebutkan bahwa struktur nalar Islam pada masa itu banyak mempengaruhi tradisi keilmuan dan moralitas pesantren, karena transmisi sistem nilai dan keilmuannya memang berasal dari produk pemikiran masa itu (M. Arif, 2001: 65). Karena itu, cukup berdasar bila Bruinessen sampai “menaruh curiga” bahwa alasan pokok yang mendasari munculnya pesantren adalah untuk mentransmisikan produk pemikiran klasik (Bruinessen, 1999:17).

Salah satu implikasi yang bisa dilihat dari hasil pertautan ini adalah proses belajar mengajar di pesantren yang tampak lebih didominasi model pemikiran deduktif-dogmatis agama daripada pemikiran induktif-rasional faktual. Dengan kata lain, tradisi teks sangat mendominasi penalaran dan pembelajaran di pesantren, sehingga penguasaan ilmu yang dapat menunjang kemampuan ber-*istidlal* dan ber-*istinbath* dari teks telah menjadi *trademark* pesantren (M. Arif, 2001: 63). Terbukti kebanyakan kitab kuning yang diajarkan di pesantren didominasi oleh pemikiran *bayani* yang banyak diterapkan dalam bidang kajian fiqh. Rata-rata di pesantren, fiqh memang mendapatkan porsi pembelajaran paling banyak daripada ilmu-ilmu lain, sehingga Bruinessen pernah menyebut fiqh seperti primadona yang digandrungi kalangan pesantren. Semua pesantren, tentu saja, juga mengajarkan al-Qur’an dan ilmu alat serta sekurang-kurangnya Tauhid dan Akhlak, namun menurutnya, inti pendidikan pesantren sebenarnya terdiri dari karya-karya fiqh. (Bruinessen, 1999: 112)

Lebih dari itu, kalau dicermati secara lebih mendalam semua unsur pembelajaran di pesantren tidak akan bisa lepas dari nuansa *bayani*. Baik kurikulum, materi ajar, pendekatan, hingga metode pembelajaran yang digunakan semuanya dirancang untuk menunjang kemampuan santri dalam memaknai teks. Pada

gilirannya, pola pembelajaran yang menjunjung tinggi teks tanpa dibarengi kesadaran akan realita, akan melahirkan pola pikir harfiah yang kaku. Apapun permasalahannya, solusinya adalah teks. Seakan-akan semua masalah bisa dihindari dan diselesaikan dengan hanya sebuah teks. Sehingga segala sesuatu yang tidak ditemukan dalam teks, maka secara otomatis tertolak, karena prinsip yang digunakan adalah *al-ashlu fi al-nash la fi al-waqi'*.

Meksi banyak mendapatkan kritik, bukan berarti nalar *bayani* tidak memiliki kelebihan. Nalar *bayani* menaruh perhatian besar dan sangat teliti terhadap proses transmisi teks secara turun-temurun. Dalam kerangka epistemologi bayani, transmisi teks dipandang sangat penting karena sebagai sumber pengetahuan, kesahihan transmisi teks akan mempengaruhi sah tidaknya hukum yang akan diputuskan. Jika transmisi teks bisa dipertanggungjawabkan berarti teks tersebut sah dan bisa dijadikan sebagai sumber. Sebaliknya, jika masih diragukan, maka kebenaran teks tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum (Soleh, 2005: 195). Oleh karena itu, dalam khazanah keilmuan Islam klasik dikenal istilah silsilah atau sanad keilmuan dari para guru yang bersambung hingga asalnya. Dalam kerangka ini, nalar *bayani* telah memberikan sumbangan yang luar biasa dalam khazanah intelektual Islam berupa pelestarian karya-karya para ulama' klasik. Berkat nalar *bayani* ini, saat ini kita masih bisa mewarisi dan menikmati karya-karya besar para ulama' semisal al-Syafi'i, al-Ghazali, al-Nawawi, dan lain-lain.

Dengan demikian, dalam konteks pendidikan Islam, nalar *bayani* bisa diterapkan sebagai sebuah pendekatan dalam rangka pembelajaran aqidah dan hukum islam terutama pada fase pemula atau dasar. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan keyakinan dan membentuk sikap peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Kurikulum yang digunakan dalam perspektif *bayani* adalah materi-materi dasar yang berisi dasar-dasar akidah dan nilai-nilai kebenaran universal. Dalam hal ini, pembelajaran bisa dilakukan dengan pendekatan tekstual, yakni dengan membaca, mendialogkan, atau menghafalkan teks.

## 2. Latar Belakang Pendidikan Kebangsaan dengan Pendekatan *Bayani*

Tahun 2012 yang lalu, setara institute pernah melakukan sebuah survey tentang penerimaan masyarakat Jateng dan DIY terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa 76.5 % masyarakat menerima posisi Pancasila sebagai dasar tegaknya NKRI tidak bisa ditawar. Artinya, posisi Pancasila sebagai dasar negara tidak tergoyahkan di hati masyarakat. Sebagian besar masyarakat tidak melihat di luar Pancasila yang dapat menjadi pengganti dasar negara. Meski demikian, posisi Pancasila di kalangan masyarakat tidaklah benar-benar aman. Buktinya, 6.9% masyarakat mengatakan sebaiknya Pancasila diganti dengan syari'at Islam sementara 16.6 % lainnya mengatakan tidak tahu (Hasani & Naipospos, 2012: 159). Angka ini memang tidak terlalu besar, tetapi jika propaganda kelompok-kelompok anti Pancasila dan NKRI terus menerus didengungkan bukan tidak mungkin angka itu akan bertambah. Buktinya, kasus-kasus penolakan hormat bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan, di lembaga-lembaga pendidikan, setiap tahunnya tidak pernah reda, malah bisa jadi bertambah.

Secara ideologis, kelompok-kelompok anti Pancasila menganggap Pancasila tidak lebih dari copy paste ideologi zionis dan freemason, yakni monoteisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi dan sosialis yang dikenalkan oleh Soekarno dan Soepomo. Maka, Pancasila adalah sebuah ideologi yang sejak kelahirannya memang dimaksudkan untuk menghalangi penerapan syariat Islam bagi kaum Muslim. Pilihan terhadap Pancasila inilah yang membuat Indonesia tidak pernah lepas dari musibah dan malapetaka politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya (Nubowo, 2015: 67). Bagi kelompok ini, menerima Pancasila sebagai dasar negara sama halnya dengan murtad dan kafir karena bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut mereka, tidak ada hukum yang benar kecuali hukum Allah (*La hukma illa Li Allah*). Islam adalah satu-satunya ideologi yang tidak akan pernah tergantikan oleh ideologi apapun.

Klaim seperti ini, kata Gus Dur, sama sekali tidak bisa diterima, baik secara teologis maupun politis. Mereka

benar bahwa hukum hanya milik Allah, tetapi siapa yang bisa sepenuhnya memahami hukum Allah?. Sekalipun itu didasarkan pada al- Qur'an dan sunnah, sebenarnya yang mereka perjuangkan adalah penafsiran mereka atas al-Qur'an dan sunnah yang tentunya tidak mutlak, karena terikat tempat dan waktu. Pada gilirannya, Islam menjadi dalih dan senjata untuk mendiskreditkan orang lain. Siapapun yang memiliki pandangan berbeda dari mereka dicap sebagai musuh Islam dan kafir, termasuk Pancasila dan NKRI (Wahid, 2009: 18-19).

Fenomena inilah yang kemudian menggerakkan KH. Taufiqul Hakim untuk menyusun sebuah kitab tentang kebangsaan. Dalam menyampaikan pikirannya, Kiai Taufiq lebih cenderung menggunakan pendekatan *bayani* atau tekstual, bukan dengan pendekatan rasional atau yang lain. Selain mencantumkan ayat al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan nomatif-dogmatis, argumen-argumen kebangsaan yang dibangun dalam kitab tersebut juga tidak keluar jauh dari ayat atau hadits. Pendekatan semacam ini memang sengaja digunakan untuk mengimbangi pandangan yang sering meneriakkan Pancasila produk kafir yang sering dipropagandakan di tengah masyarakat.

Sebagaimana diketahui, karakter kelompok-kelompok macam ini salah satunya adalah tekstualistik. Yaitu pandangan keagamaan yang hanya menitik-beratkan kepada "yang tersurat" secara tekstual tanpa pengetahuan perangkat ijtihad yang memadai. Mereka sering terjebak dalam pemahaman mereka sendiri akan sebuah teks, tanpa mencoba berusaha untuk memahami dari perspektif lain. Akibatnya, apa saja yang tidak ada dalam pemahaman mereka, dicap dan dituduh kafir. Maka, untuk dapat mengimbangi atau menangkis pandangan yang beredar di masyarakat, jalan satu-satunya adalah dengan mengikuti jalan pikiran mereka yang tekstualis. Yaitu menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dengan disertai landasan teks dari al-Qur'an dan Hadits.

Dalam kata pengantarnya, Kiai Taufiq menjelaskan secara singkat tentang alasannya menyusun sebuah kitab yang berisi tentang Pancasila dan kebangsaan.

“Dasar negara kesatuan republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila mengandung nilai-nilai universal dengan prinsip Bhinneka tunggal ika yang telah disepakati menjadi dasar negara dan menjadi payung bagi kehidupan bersama dalam berbagai perbedaan. Namun di sisi lain, ada kelompok tertentu yang berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak relevan sebagai dasar negara karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya kitab ini, memberikan pengertian kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa Pancasila sesuai dengan ajaran Islam (Hakim, 2014: i).”

Dari sini bisa dipahami, bahwa Kiai Taufiq hendak menyampaikan kepada khalayak bahwa Pancasila sama sekali tidak seperti yang dipropagandakan kaum anti Pancasila. Pancasila masih dan akan tetap menjadi dasar negara Indonesia karena sudah sesuai dengan ajaran Islam, dan oleh karenanya tidak perlu diganti dengan ideologi lain. Dari kata pengantar tersebut, bisa dipahami juga bahwa secara tidak langsung, Kiai Taufiq hendak menyoal para kelompok pembenci Pancasila, dengan menunjukkan bahwa Pancasila yang selama ini mereka tuduh kafir itu, berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam yang ia sampaikan, ternyata sangat sesuai syari’at Islam.

Kiai Taufiq mengkritik perilaku sebagian umat Islam yang suka mengkafirkan, menghancurkan dan bahkan membunuh dengan membawa-bawa nama agama. Orang-orang seperti ini sejatinya adalah orang bodoh, karena hanya memahami Islam dari kulitnya saja tanpa mengerti substansinya. Cirinya yang paling menonjol, mereka seringkali membawa simbol-simbol agama tapi justru berperilaku jauh dari ajaran agama. Dengan membawa simbol bukan berarti seseorang serta merta telah mengamalkan ajaran Islam, karena kalau hanya sekedar simbol, orang gila sekalipun bisa membawanya (Hakim, 2014: 72).

Selain alasan di atas, yang tidak kalah penting, penerapan pendekatan *bayani* berfungsi untuk membekali santri khususnya, dan masyarakat pada umumnya, dengan nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan perspektif ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut akan tertancap kuat sebagai sebuah keyakinan karena telah dilegitimasi oleh teks-teks suci yang tidak mungkin diragukan kebenarannya.

Ini menjadi sangat penting mengingat propaganda dan pembenturan Pancasila versus Islam semakin masif, baik lewat dunia nyata, dan terutama via dunia maya. Untuk membentengi diri dari propaganda anti Pancasila, santri dan terutama masyarakat awam, harus dibekali pemahaman dan keyakinan yang kuat tentang Pancasila dan relevansinya dengan ajaran Islam.

### **3. Pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan Pendekatan *Bayani***

Pendidikan wawasan kebangsaan bisa diartikan sebagai upaya menanamkan dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia, baik dari sisi pemahaman, rasa, ataupun semangat tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Supriyatna, et.al, 2009: 8).

Dalam pelaksanaannya, pendidikan wawasan kebangsaan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan dan metode. Dalam konteks lembaga pendidikan misalnya, pendidikan wawasan kebangsaan bisa diimplementasikan dengan pendekatan integratif melalui beberapa mata pelajaran, seperti pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, sejarah, ataupun bahasa. Pendidikan wawasan kebangsaan juga bisa dijadikan mata pelajaran tersendiri sebagai muatan lokal tanpa terikat dengan mata pelajaran lain. Sedangkan di luar kelas bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka atau seni budaya (Kemenko Polhukam, 2016: 7-9). Sementara di pesantren, wawasan kebangsaan umumnya dilaksanakan melalui pendekatan tradisi atau budaya dengan cara pelestarian atau pemeliharaan terhadap tradisi, budaya, atau khazanah intelektual warisan ulama' Nusantara. Pendidikan kebangsaan di pesantren secara tidak langsung juga diwujudkan dengan ritual-ritual keagamaan semisal *istighatsah* dan selamatan dalam rangka penghormatan kepada para leluhur, ulama, dan pejuang (Baso, 2012: 4). Ada pula pesantren yang mengimplementasikan pendidikan kebangsaan dalam bentuk gerakan, seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung dengan Gerakan Membangun Nurani Bangsa atau Gema Nusa (Said, 2014: 10).

Di PP. Darul Falah, pendidikan kebangsaan dilaksanakan melalui pembelajaran kitab *Mitsaq al-Madinah; Pancasila dan Piagam Madinah* atau biasa dikenal santri dengan sebutan “kitab Pancasila”. Kitab ini diajarkan melalui dua program pembelajaran, yakni pengajian umum dan Madrasah Diniyah. Program pengajian umum dilaksanakan dengan sistem non klasikal yang dilaksanakan selepas maghrib di pesanggrahan (aula utama pesantren). Pengajian ini diampu langsung oleh KH. Taufiqul Hakim atau ustadz *badal* jika Kiai Taufiq *udzur* dan dihadiri oleh masyarakat setempat. Adapun program yang kedua, yaitu Madrasah Diniyah, kitab *Mitsaq al-Madinah* ini wajib dipelajari oleh setiap santri yang telah menduduki tingkat *munakahat* (wawancara Najib Habibi, 2017).

**a. *Mitsaq al-Madinah; Kitab Kebangsaan Bercorak Bayani***

Sebagaimana disampaikan di muka, bahwa tradisi pesantren salaf selalu didominasi oleh tradisi bayan. Demikian pula, dalam upayanya mengajarkan wawasan kebangsaan, PP. Darul Falah lebih cenderung menggunakan pendekatan *bayani*, yakni pendekatan yang mengutamakan pemahaman nash al-Qur’an dan Hadits. Hal ini bisa dilihat dari kitab pegangan yang diajarkan, yaitu kitab *Mitsaq al-Madinah; Pancasila dan Piagam Madinah* atau biasa dikenal santri dengan sebutan “kitab Pancasila”. Dari pola pembahasannya, terlihat sangat jelas nuansa *bayani*-nya yakni pendasaran sila-sila Pancasila dan materi lain kepada nash-nash al-Qur’an dan Hadits. *Bayan* berupa teks al-Qur’an, Hadits, atau ijtihad ulama’ dalam hal ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk melegitimasi dan menguatkan pilar-pilar kebangsaan seperti Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Tujuannya agar santri dapat memahami, menghayati, dan selanjutnya meyakini bahwa nilai-nilai kebangsaan yang telah disepakati para pendiri bangsa sama sekali tidak bertentangan dengan sumber-sumber ajaran Islam.

Kitab karya KH. Taufiqul Hakim setebal 112 halaman ini memuat materi tentang Pancasila, Islam dan Bhinneka Tunggal Ika, Islam adalah agama Rahmat, dan Piagam Madinah. Materi-materi kebangsaan tersebut dipaparkan satu persatu dengan diberikan ulasan dan penjelasan secara singkat. Sebagai dasar sekaligus

legitimasi sila beserta argumen-argumennya, kemudian dikutip ayat al-Qur'an atau hadits nabi. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam menghafal dan mengingat, dalil Qur'an atau hadits tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk bait *nadham*. Setiap satu pembahasan materi, maka selalu diikuti satu bait *nadham*. Yang cukup unik, ringkasan dalam bentuk *nadham* tersebut tidak hanya ditulis dalam versi Arab, tetapi juga versi Jawa dan Indonesia.

Dalam membahas Pancasila misalnya, pembahasan diawali dengan bunyi sila pertama, yakni ketuhanan yang maha esa. Kemudian di sana dijelaskan bahwa sila ini mengandung makna ketauhidan dan keimanan kepada Tuhan Yang Esa. Setiap warga negara wajib mengamalkan sila ini sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk memberikan dasar hukum dan legitimasi terhadap sila tersebut, kemudian dikutip beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan tentang keesaan Allah swt., salah satunya adalah al-Baqarah ayat 163. Relevansi ayat ini dengan sila pertama adalah bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keimanan dan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana Islam memerintahkan umatnya untuk beriman kepada Tuhan Yang Esa. Materi sila pertama ini kemudian dirangkum dalam sebuah bait *nadham*:

إن إلهكم إله واحد ☀ هو الرحيم الأحد الباري المجيد

Pengeranmu kabeh Pengeran kang Siji ☀ Kang Maha Welas Asih lan Maha Siji

Tuhan kamu semua Tuhan Yang Esa ☀ Maha Pemurah Penyayang Maha Esa  
(Hakim, 2014: 4)

Pola pembahasan dengan pendekatan teks semacam ini digunakan dalam mengupas semua materi kebangsaan seperti kebhinekaan, toleransi, pluralisme, dan lain-lain. Tentang Prinsip Bhinneka Tunggal Ika misalnya, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, adat, ras, agama, budaya, dan bahasa harus tetap menjadi satu kesatuan. Islam mengakui adanya pluralitas sebagai sebuah takdir penciptaan agar manusia saling mengenal dan membantu demi mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama. Dalil al-Qur'an yang digunakan untuk memperkuat argumen ini adalah surat al-Hujurat ayat 13 (Hakim, 2014: 20). Ayat ini merupakan penegasan Allah swt.

bahwa kebhinekaan dan perbedaan merupakan takdir yang tidak bisa ditolak. Justru dengan keragaman itu manusia memiliki kesempatan untuk saling mengenal dan melengkapi demi mencapai kemaslahatan bersama. Selain ayat tersebut, beberapa hadits tentang sikap Rasulullah yang selalu menjaga hubungan baik dengan non muslim juga dikutip untuk menguatkan nilai-nilai kebhinekaan.

Mengacu sistematika kitab tersebut, maka praktik pembelajaran baik di forum pengajian umum ataupun di dalam kelas juga dilaksanakan dengan pola serupa. Kiai atau ustadz terlebih dahulu menjelaskan materi, lalu pemaparan dalil-dalilnya, dan kemudian diakhiri dengan membaca bait *nadham* yang merupakan rangkuman dari materi. Dengan demikian, dalam praktik pembelajaran santri tidak hanya diajarkan untuk memahami Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan dari sudut legal-formal, tetapi sekaligus pemahaman dari sudut pandang teks keagamaan. Dari sini diharapkan penerimaan dan keyakinan terhadap nilai-nilai kebangsaan tidak lagi sebatas nalar *burhani* (rasional), tetapi juga memiliki pijakan nalar *bayani* (wahyu) yang diyakini suci dan mutlak kebenarannya. Maka, jika wahyu yang dianggap suci dan mutlak itu telah melegitimasi dan membenarkan nilai-nilai kebangsaan, harusnya itu diyakini dan dipegang kuat-kuat sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa Pancasila dan NKRI tidak sesuai syari'at Islam.

#### **b. Metode Pembelajaran dalam Pendekatan Bayani**

Beberapa metode pembelajaran di pesantren, jika dicermati tampak sangat kental akan nuansa tekstual-*bayani*. Metode *bandongan*, *sorogan*, dan hafalan adalah metode-metode yang memang dirancang untuk mendukung kemampuan dalam memperlakukan teks. Hasil akhir yang diharapkan dari metode-metode ini adalah kemampuan membaca, menerjemah, memahami, dan mengingat teks-teks kitab yang dipelajari. Sebagai sebuah pesantren salaf, dalam melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan, PP. Darul Falah tetap menjaga patron kesalafannya dengan menggunakan metode-metode khas pesantren yang cenderung bernuansa *bayani*, yaitu *bandongan*, hafalan, dan *takraran* (wawancara Syamsul Huda, 2017).

Pertama metode *bandongan*, yaitu metode pembelajaran dengan cara ustadz membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan teks kitab sementara santri mendengarkan dan mencatat makna dari teks yang dipelajari (Dhofier, 2011: 54). Dalam kerangka metode ini, Kiai atau ustadz pengampu kitab Mitsaq al-Madinah menyampaikan penjelasan tentang sila atau materi tertentu dengan cara ceramah sementara santri mendengarkan dan membuat catatan. Ustadz juga membaca dan memaknai dalil-dalil yang tertulis di kitab, baik al-Qur'an maupun Hadits. Jika pembahasan satu sila atau materi dianggap cukup, maka ustadz dan santri melantunkan bait *nadham* bersama-sama. Urutan pembacaan *nadham* yakni *nadham* berbahasa Arab dulu, kemudian bahasa Jawa. Adapun irama yang digunakan dalam melantunkan *nadham* ini bebas, asalkan sesuai dengan notasi atau bahar yang digunakan dalam *nadham*. Metode *bandongan* ini diterapkan dengan tujuan agar santri dapat memahami materi kebangsaan sekaligus memahami dalil-dalil yang melandasi nilai-nilai di dalamnya.

Kedua, adalah metode menghafal atau mempelajari sesuatu dan meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat (Pusat Bahasa, 2008: 513). Dalam pembelajaran kitab Pancasila ini, kegiatan menghafalkan difokuskan pada dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits dan *nadham* yang merupakan ringkasan dari materi. Menghafal bisa dilakukan oleh santri secara mandiri di luar waktu pembelajaran. Hasil dari aktifitas menghafal santri ini kemudian disetorkan atau di-tashih-kan kepada ustadz pengampu. Kegiatan ini bertujuan agar *nadham* sekaligus dalil-dalil wawasan kebangsaan yang telah diajarkan di kelas dapat meresap ke dalam pikiran sehingga selalu diingat.

Ketiga, metode takaran atau mengulang suatu lafal atau kalimat untuk menetapkan makna (al-Sabt, 1997: 701). Takaran atau dalam istilah pesantren disebut juga dengan lalaran adalah kegiatan mengulang-ulang materi pelajaran dengan cara membaca atau melafalkan secara bersama-sama. Takaran sangat bermanfaat untuk memudahkan proses menghafalkan atau menjaga hafalan. Dalam hal ini, takaran dilakukan dengan melantunkan bait-bait *nadham* yang telah dipelajari di kelas. Kegiatan takaran ini dilaksanakan bersama-sama oleh santri secara mandiri

tanpa didampingi ustadz, tetapi tetap diawasi oleh pengurus pesantren. Dalam kegiatan takraran nadham ini, seringkali santri menggunakan tabuh-tabuhan seadanya seperti galon atau piring untuk mengiringi pelantunan nadham. Kegiatan takraran ini, selain bertujuan untuk menjaga hafalan dan pemahaman, juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menghayati isi nadham sehingga dapat mempengaruhi karakter santri.

Dengan demikian, bisa digarisbawahi bahwa metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bayani* adalah bandongan, hafalan, dan *takraran*. Ketiga metode ini jika dicermati sangat bertumpu pada sekitar teks (*haul al-nash*) yang menjadi ciri utama nalar *bayani*. Dalam kerangka ini, teks tidak hanya dibaca, diterjemah, lalu dipahami, tetapi juga dihafalkan bahkan dibaca berulang-ulang layaknya sebuah wirid. Kelemahan metode-metode ini adalah kurangnya eksplorasi pada ranah berpikir analitis dan terlebih pada ranah afektif. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang komprehensif tentang teks, santri hanya akan menjadi burung beo yang fasih berkata-kata tanpa mampu memahami atau menghayati maknanya.

Memang tidak ada jaminan bagi yang hafal Pancasila dan menjadikannya “wiridan” akan secara otomatis memahami dan menjalankannya isinya. Tetapi setidaknya dengan hafalan itu, orang akan lebih mudah memahami, menghayati, dan kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dari pada yang tidak hafal sama sekali. Dalam konteks ini, Mahfud MD pernah menegaskan bahwa orang memang tidak diwajibkan hafal Pancasila. Tetapi untuk bisa memahami, apalagi mengimplementasikannya, maka orang harus hafal dulu Pancasila (Ruslan, 2017: 4).

### **c. Tujuan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan Pendekatan *Bayani***

Secara umum, tujuan pendidikan wawasan kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Permendagri No. 71 tahun 2012 adalah mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Menteri Dalam Negeri RI, 2012: 4). Mochtar Buchori seperti dikutip Dikdik Baehaqi Arif menggariskan sasaran pendidikan kebangsaan pada dua aspek, yaitu moral dan intelektual. Artinya, pendidikan wawasan kebangsaan tidak hanya menasar pada aspek intelektual atau katakanlah ranah kognitif, tetapi juga moral atau afektif. Maka dari itu, setiap unsur dalam pendidikan wawasan kebangsaan, baik dari segi materi, metode, maupun kegiatan pembelajaran harus dirancang untuk membentuk kedua aspek kemampuan para peserta didik, yaitu aspek moral dan aspek intelektual (D. B. Arif, 2016).

Adapun tujuan pendidikan wawasan kebangsaan di PP. Darul Falah adalah untuk membekali para santri dengan wawasan kebangsaan pada tiga aspek kemampuan, yakni pemahaman, hafalan, dan sikap (wawancara Zainurridlo, 2017. Dengan pembelajaran kitab Pancasila tersebut, santri diharapkan mampu memahami Pancasila beserta landasannya perspektif ajaran Islam, menghafal dalil dan *nadhamnya*, dan yang lebih penting mampu menunjukkan sikap dan perilaku kebangsaan. Oleh karena itu, dalam praktik pembelajaran, kitab *Mitsaq al-Madinah* tidak hanya diajarkan melalui kegiatan pembelajaran formal di kelas saja, tetapi juga melalui kegiatan hafalan dan *takraran*. Dengan rancangan kegiatan semacam itu, santri tidak hanya belajar memahami isi kitab dan menghafalkan dalil dan *nadham* di dalam kitab, tetapi juga membaca *nadham* tersebut berulang-ulang.

Melantunkan *nadham* secara berulang-ulang disertai nada dan irama diharapkan bisa menjadi sarana untuk menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam *nadham*. Sehingga sedikit demi sedikit nilai-nilai kebangsaan dalam *nadham* akan terinternalisasikan ke dalam pikiran dan jiwa santri. Pada akhirnya, nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada perubahan sikap dan perilaku. Hal ini ditegaskan oleh KH. Taufiqul Hakim dalam panduan pembelajaran kitab *Mitsaq al-Madinah*, bahwa pembacaan *nadham* secara berulang-ulang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam jiwa sehingga akhirnya dapat mengejawantah dalam sikap dan karakter santri (Hakim, 2014: iii).

*Nadham, syi'ir*, atau lirik-lirik berirama dalam konteks pembelajaran memang dipandang lebih memudahkan peserta didik untuk menghafal dan mengingat materi daripada materi yang dikemas dalam bentuk prosa. Al-Jahidh, sastrawan fenomenal penulis buku anekdot al-Hayawan, menegaskan pengetahuan akan mudah diserap jika dikemas dalam bentuk syi'ir atau *nadham*. Hafalan dan ingatan itu yang pada gilirannya akan banyak membantu dalam mengimplementasikan pengetahuan (Zadah & Rausyanfikir, 2007: 52).

Lebih dari itu, musik, lagu, ataupun segala jenis irama dipandang mampu meniupkan kesadaran pribadi dan menumbuhkan spirit positif dalam diri manusia. Bertolak pada teori psikologi musik, Rochim et.al menegaskan, lagu dan musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jiwa seseorang dan mengarahkannya kepada suatu tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan secara verbal lewat sebuah lirik yang dilantunkan dengan irama yang harmonis akan lebih mudah menyentuh emosi manusia (Rochim, et.al, 2014: 2).

Penanaman nilai lewat lagu, *syi'ir*, musik, dan sejenisnya juga telah lama dikenal dalam tradisi Islam. Dalam ajaran tasawuf, dikenal ajaran *sama'* yaitu bernyanyi atau mendengarkan puji-pujian sebagai metode mendekatkan diri kepada Allah swt. Bagi para sufi, *sama'* adalah sarana untuk mengenali dan menghayati Tuhan sehingga sifat-sifat tuhan dapat mengalir dalam diri para sufi. Dari segi praktik lahiriahnya, ritual *sama'* merupakan kegiatan mendengarkan atau menyanyikan *syi'ir*, terkadang diikuti dengan gerakan tubuh atau tarian, baik dengan atau tanpa iringan alat musik yang dilakukan secara berkelompok. Bagi kaum sufi, ritual *sama'* memiliki makna filosofis yang sangat erat hubungannya dengan jiwa manusia, baik tata caranya, *syi'ir*-nya, maupun alat musik yang digunakan (Muhaya, 2003: 13).

Walhasil, pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bayani* di PP. Darul Falah telah memenuhi dua aspek sasaran pendidikan wawasan kebangsaan, yaitu aspek moral dan intelektual. Aspek moral dalam hal ini adalah sikap kebangsaan santri yang diperoleh dari proses menghayati nilai-nilai kebangsaan lewat pelantunan *nadham* secara berulang-ulang.

Sementara aspek intelektual adalah kompetensi pemahaman dan hafalan. Dua kompetensi ini merupakan tangga dasar atau pintu gerbang menuju tujuan akhir pendidikan wawasan kebangsaan, yaitu pembentukan sikap. Karena, tanpa adanya pemahaman dan hafalan, pencapaian kompetensi sikap melalui pengulangan *nadham* akan sulit tercapai.

### C. Simpulan

Penerapan pendekatan *bayani* dalam pendidikan wawasan kebangsaan di PP. Darul Falah dilatarbelakangi antara adanya propaganda sebagian kelompok umat Islam bahwa Pancasila tidak sesuai dengan ajaran Islam. Untuk membentengi santri dan masyarakat dari propaganda tersebut, dan terutama untuk meyakinkan kebenaran Pancasila, maka jalan yang ditempuh adalah mengajarkan wawasan kebangsaan dengan pendekatan teks keagamaan. Implementasi pendekatan *bayani* dalam pendidikan wawasan kebangsaan dilakukan melalui kegiatan pembelajaran kitab *Mitsaq al-Madinah* karya KH. Taufiqul Hakim. Pola pembahasan yang diterapkan adalah dengan menyampaikan materi satu persatu disertai dengan ulasan dalil al-Qur'an atau Hadits dan kemudian dirangkum menjadi sebuah *bait nadham*. Dalam praktik pembelajarannya, metode yang digunakan adalah bandongan, hafalan, dan takraran. Santri tidak hanya dituntut untuk memahami materi-materi kebangsaan, tetapi juga menghafal dan *me-wirid* materi tersebut.

Pola pembelajaran semacam ini menyimpan kelemahan berupa minimnya peluang bagi santri untuk mengeksplorasi ranah berpikir analitis dan terlebih ranah afektif. Hal ini karena hampir semua aktifitas pembelajaran sangat bertumpu pada teks, dari teks, dan untuk teks. Untuk mengatasi hal ini, jalan yang paling realistis adalah dengan memodifikasi kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan banyak metode dan pengayaan media pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna tanpa harus keluar dari "area" teks.

Pendidikan wawasan kebangsaan dengan pendekatan *bayani* di pesantren bisa dimaknai sebagai upaya mengajarkan wawasan kebangsaan dengan tetap berpegang pada tradisi

pesantren itu sendiri, yaitu tradisi *bayani*. Terlepas dari segala kelemahannya, apa yang telah dikembangkan oleh PP. Darul Falah dalam hal pendidikan kebangsaan dengan pendekatan *bayani*-nya bisa dijadikan sebagai rujukan oleh pesantren lain dalam upaya mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Karena saat ini, masih jarang pesantren yang memiliki format baku dalam melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 2012. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arif, Dikdik Baihaqi. 2016. Memperkuat Pendidikan Kebangsaan yang Berkemajuan. In *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan* (Vol. II, pp. 197–208). Yogyakarta: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FIS UNY bekerjasama dengan AP3KnI Wilayah DI Yogyakarta. Retrieved from <http://eprints.uad.ac.id/4454/>
- Arif, Mahmud. 2001. *Tradisi Bayani dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Baidhawiy, Zakiiyuddin. 2015. Negara Pancasila Negara Syariah. *Maarif*, 10 (1), 42–57.
- Baso, Ahmad. (2012). Kembali ke Pesantren, Kembali ke Karakter Ideologi Bangsa. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 20 (1), 1–20. <https://doi.org/10.19105/karsa.v20i1.50>
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hakim, Taufiqul. 2014. *Mitsaq al-Madinah; Pancasila dan Piagam Madinah*. Jepara: PP. Darul Falah.
- Hasani, Ismail, & Naipospos, Bonar Tigor. 2012. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- al-Jabiri, M. Abed. 2000. *Post Tradisionalisme Islam* terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: LKiS.

- Sekolah Larang Hormat Bendera. Retrieved December 14<sup>th</sup> 2017 from <http://mediaindonesia.com/news/read/64540/sekolah-larang-hormat-bendera/2016-09-01>
- Kemenko Polhukam. 2016. *Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Kemenko Polhukam RI.
- Bakar Umbul-umbul Merah Putih, Ponpes di Bogor Ditutup Warga. Retrieved December 14<sup>th</sup> 2017 from <http://news.liputan6.com/read/3061841/bakar-umbul-umbul-merah-putih-ponpes-di-bogor-ditutup-warga>
- Menteri Dalam Negeri RI. 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Kemendagri.
- Muhaya, Abdul. 2003. *Bersufi Melalui Musik; Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh al-Ghazali*. Yogyakarta: Gama Media.
- Naim, Ngainun. 2009. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nubowo, Andar. 2015. Islam dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 61–78.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Rochim, Safran., Rahman, H. N., & Hariyono, W. 2014. Pendidikan Karakter bagi Pelajar Sekolah Menengah melalui Pembudayaan dan Permaknaan Lagu-lagu Nasional (Sebuah Upaya Mewujudkan Kesehatan Mental dan Sosial). In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2014 "Inovasi Pendidikan Sains dalam Menyongsong Pelaksanaan Kurikulum 2013."* Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Rokhmad, Abu. 2014. Dasar Negara dan Taqiyah Politik PKS. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 1–24.
- Ruslan, Idrus. 2017. Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Nilai Islam dalam Pancasila. *Jurnal TAPIS*, 9(2), 1–16.

- al-Sabt, Khalid. ibn Utsman. (1997). *Qawa'id al-Tafsir Jam'an wa Dirasah Jilid 2*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.
- Said, Nur. 2014. Pengarusutamaan Spiritual Dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Studi Kasus Gema Nusantara di Pesantren Daarut Tauhid Bandung). *Jurnal Quality*, 2(2), 7–31.
- Soleh, A. Khudori. 2005. Model-model Epistimologi Islam. *Psikoislamika*, 2(2), 194–201.
- Supriyatna, Mamat., Suyitno, Riksayustiana, Y., & Nurdin, S. (2009). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Berwawawan Kebangsaan di SMP*. Jakarta: Depdiknas.
- Wahid, Abdurrahman (ed). 2009. *Ilusi Negara Islam*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Zadah, Jawwad Ghulamaly., & Rausyanfikir, Kubra. (2007). al-Syi'r al-Ta'limy; Khasha'ishuhu wa Nasy'atuhu fi al-Adab al-'Araby. *Majallah Al-'Ulum Al-Insaniyyah*, 14(2), 47–62.

